

Peran Kelompok Tani Hutan dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar

Mini Silviana^{1*}, Supriyan Syahrizal²

¹Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Riau

²Penyuluh Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau

*Email Korespondensi: minisilviana24@gmail.com

Abstrak

Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan salah satu kelembagaan masyarakat yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan program perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Keberadaan KTH tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan kelembagaan, pengembangan usaha produktif, dan peningkatan partisipasi dalam kegiatan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kelompok Tani Hutan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus berdasarkan data sekunder yang berasal dari laporan pembentukan dan pendampingan KTH oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau pada beberapa desa penyangga Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, serta didukung oleh berbagai literatur terkait perhutanan sosial, agroforestri, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTH berperan dalam empat aspek utama, yaitu penguatan kelembagaan kelompok, pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesadaran konservasi masyarakat. Program pendampingan yang dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, bantuan usaha produktif, dan penguatan organisasi kelompok telah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha bersama serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Selain memberikan manfaat ekonomi melalui pengembangan usaha produktif, KTH juga berkontribusi dalam memperkuat modal sosial masyarakat melalui kerja sama, gotong royong, dan pengambilan keputusan secara partisipatif. Oleh karena itu, KTH dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat sekitar hutan yang berkelanjutan dan berorientasi pada keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Kata kunci: Kelompok Tani Hutan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Perhutanan Sosial, Konservasi Hutan

Abstract

Forest Farmer Groups (KTH) are community-based institutions that play an important role in supporting the success of social forestry programs and empowering communities living around forest areas. The existence of KTH serves not only as a platform for sustainable forest resource management but also as a means of enhancing community capacity through institutional strengthening, productive business development, and increased participation in conservation activities. This study aims to analyze the role of Forest Farmer Groups in community empowerment and welfare improvement in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. The research employed a qualitative descriptive method with a case study approach based on secondary data derived from reports on the establishment and facilitation of KTH by the Riau Natural Resources Conservation Agency (BBKSDA Riau) in several buffer villages surrounding the Bukit Rimbang Bukit Baling Wildlife Reserve, supported by various literature related to social forestry, agroforestry, and community empowerment. The results indicate that KTH play significant roles in four main aspects: strengthening group institutions, developing productive economic enterprises, enhancing human resource capacity, and increasing community awareness of conservation. Assistance programs implemented through extension services, training, productive business support, and organizational strengthening have improved the community's ability to manage collective enterprises and increased public participation in maintaining forest sustainability. In addition to providing economic benefits through productive business development, KTH also contribute to strengthening social capital through cooperation, mutual assistance, and participatory decision-making. Therefore, KTH can serve as a strategic instrument in supporting sustainable community development around forest areas, balancing community welfare with environmental conservation.

Keywords: Forest Farmer Groups (KTH), Community Empowerment, Community Welfare, Social Forestry, Forest Conservation

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Selain berperan sebagai penyedia jasa lingkungan, pengatur tata air, penyerap karbon, dan habitat berbagai jenis flora dan fauna, hutan juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Namun demikian, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan sering kali menimbulkan tekanan terhadap kawasan hutan, terutama apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai permasalahan seperti degradasi hutan, konflik tenurial, perambahan kawasan, serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti rendahnya akses terhadap sumber daya ekonomi, modal usaha, teknologi, informasi, dan pasar. Keterbatasan tersebut menyebabkan masyarakat cenderung memanfaatkan sumber daya hutan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pengelolaan hutan yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu kebijakan yang dikembangkan pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah program perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi konflik pengelolaan sumber daya hutan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Menurut Gunawan *et al.* (2022), perhutanan sosial dikembangkan untuk menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis secara simultan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selain meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, perhutanan sosial juga berperan dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan keberlanjutan fungsi ekosistem hutan.

Dalam implementasinya, keberhasilan program perhutanan sosial sangat dipengaruhi oleh keberadaan kelembagaan masyarakat yang kuat. Salah satu kelembagaan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan perhutanan

sosial adalah Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, pengembangan usaha produktif, serta peningkatan kapasitas anggota dalam pengelolaan sumber daya hutan. Keberadaan KTH memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pendampingan, pelatihan, bantuan usaha produktif, dan berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.

Kelompok Tani Hutan tidak hanya berfungsi sebagai organisasi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana penguatan modal sosial masyarakat. Melalui KTH, masyarakat dapat membangun kerja sama, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengembangkan usaha produktif yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Asmoro *et al.* (2021) menjelaskan bahwa kualitas pemberdayaan KTH dipengaruhi oleh dukungan penyuluhan, kepemimpinan kelompok, dan lingkungan internal kelompok yang kondusif. Pemberdayaan yang efektif akan meningkatkan kemandirian kelompok dalam mengelola usaha, memperluas jaringan kemitraan, dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sumber daya hutan sebagai sumber penghidupan. Untuk mendukung pengelolaan kawasan yang berkelanjutan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pendampingan Kelompok Tani Hutan di beberapa desa penyangga kawasan konservasi, seperti Desa Terusan, Desa Batu Sanggan, dan Desa Muara Bio.

Program pendampingan yang dilakukan meliputi penguatan kelembagaan kelompok, penyuluhan, pelatihan, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi kawasan hutan. Melalui kegiatan tersebut, KTH diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas, mengembangkan usaha produktif, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sekaligus mitra dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan kelompok masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Octavia *et al.* (2022) menyatakan bahwa pengembangan agroforestri dan usaha produktif berbasis perhutanan sosial dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui KTH juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap eksploitasi kawasan hutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi sumber daya alam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana peran Kelompok Tani Hutan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kontribusi KTH dalam aspek kelembagaan, ekonomi, sosial, dan konservasi, serta menjadi bahan masukan bagi pengembangan program pemberdayaan masyarakat berbasis perhutanan sosial di masa mendatang.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Wilayah penelitian mencakup beberapa desa penyangga kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling yang menjadi lokasi pembentukan dan pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, yaitu Desa Terusan, Desa Batu Sanggan, Desa Gema dan Desa Muara Bio. Penelitian dilaksanakan pada periode Januari–Mei 2026 melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber terkait.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Kelompok Tani Hutan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan KTH yang didampingi

oleh BBKSDA Riau pada kawasan penyangga Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

1. Laporan pembentukan dan pendampingan Kelompok Tani Hutan yang disusun oleh BBKSDA Riau pada tahun 2022–2024.
2. Dokumen kebijakan terkait perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan kawasan konservasi.
3. Artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, prosiding seminar, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Kelompok Tani Hutan, perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, agroforestri, dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
4. Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumentasi (*document study*) dan studi literatur (*literature review*). Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan kegiatan pembentukan dan pendampingan KTH yang telah dilaksanakan oleh BBKSDA Riau. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai publikasi ilmiah yang membahas pemberdayaan masyarakat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, perhutanan sosial, serta penguatan kelembagaan kelompok tani hutan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan utama yang mengacu pada model *Miles* dan *Huberman*, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber diseleksi, dikelompokkan, dan disederhanakan berdasarkan fokus penelitian. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan peran KTH dalam aspek kelembagaan, ekonomi, sosial, dan konservasi.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dan matriks analisis sehingga memudahkan interpretasi serta penarikan kesimpulan. Penyajian data difokuskan pada bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan melalui KTH dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis untuk memperoleh gambaran mengenai kontribusi KTH dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Kesimpulan disusun berdasarkan keterkaitan antara temuan lapangan, teori pemberdayaan masyarakat, dan konsep perhutanan sosial yang terdapat dalam berbagai literatur.

Kerangka Analisis

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada empat aspek utama peran Kelompok Tani Hutan, yaitu:

Aspek Analisis	Indikator
Kelembagaan	Struktur organisasi, administrasi kelompok, kepemimpinan, dan partisipasi anggota
Ekonomi	Pengembangan usaha produktif, peningkatan aset kelompok, dan peluang pendapatan
Sosial	Kerja sama, gotong royong, modal sosial, dan partisipasi Masyarakat
Konservasi	Kesadaran lingkungan, keterlibatan dalam perlindungan kawasan, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

Keempat aspek tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana Kelompok Tani Hutan berperan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung tujuan konservasi kawasan hutan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kelompok Tani Hutan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Kawasan ini memiliki nilai ekologis yang tinggi sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna serta berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang penting bagi masyarakat sekitar. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sumber daya alam, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari.

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pelestarian kawasan konservasi, BBKSDA Riau melakukan pembentukan dan pendampingan beberapa Kelompok Tani Hutan (KTH) pada desa penyangga kawasan konservasi. Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha produktif sekaligus menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan KTH memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pendampingan, pelatihan, penyuluhan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif. Selain berfungsi sebagai wadah organisasi masyarakat, KTH juga menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak.

Peran KTH dalam Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Salah satu peran utama KTH adalah sebagai lembaga masyarakat yang mampu memperkuat kapasitas organisasi masyarakat desa. Sebelum terbentuknya kelompok, sebagian besar kegiatan masyarakat dilakukan secara individual sehingga akses terhadap informasi, bantuan pemerintah, maupun program pemberdayaan masih relatif terbatas.

Melalui pembentukan KTH, masyarakat memperoleh wadah yang lebih terstruktur untuk merencanakan kegiatan, menyusun program kerja, dan mengelola usaha bersama. Pendampingan yang dilakukan BBKSDA Riau meliputi pembentukan struktur organisasi kelompok, penyusunan administrasi kelompok, pembagian tugas pengurus, serta penguatan mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Penguatan kelembagaan tersebut memberikan dampak positif terhadap kemampuan kelompok dalam mengelola program pemberdayaan. Kelompok yang memiliki struktur organisasi yang jelas cenderung lebih mudah berkoordinasi dan lebih siap menerima berbagai bentuk dukungan dari pemerintah maupun lembaga mitra. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Asmoro *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pemberdayaan KTH sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, penyuluhan, dan lingkungan internal kelompok yang kondusif.

Keberadaan KTH juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Anggota kelompok tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, KTH berfungsi sebagai media pembelajaran demokrasi lokal yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Peran KTH dalam Pengembangan Usaha Produktif dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Aspek ekonomi merupakan salah satu fokus utama dalam program pemberdayaan masyarakat melalui KTH. Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui pengembangan usaha produktif yang sesuai dengan potensi dan kondisi lokal masyarakat.

Pendampingan yang dilakukan BBKSDA Riau mencakup bantuan usaha produktif berupa ternak, pelatihan teknis pengelolaan usaha, serta pendampingan pengembangan kelompok. Bantuan tersebut bertujuan menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sehingga ketergantungan terhadap pemanfaatan sumber daya hutan secara langsung dapat dikurangi.

Keberadaan usaha produktif memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk peningkatan aset kelompok dan peluang pengembangan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, usaha yang dikelola secara kelompok memungkinkan terjadinya pembagian risiko usaha sehingga anggota kelompok memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan keberlanjutan kegiatan ekonomi mereka.

Dalam perspektif perhutanan sosial, pengembangan usaha produktif menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Gunawan *et al.* (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial tidak hanya diukur dari peningkatan akses masyarakat terhadap kawasan hutan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Program pengembangan usaha produktif yang didampingi BBKSDA Riau juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi dengan sistem agroforestri dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Diversifikasi usaha tersebut dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung konservasi kawasan hutan.

Peran KTH dalam Penguatan Modal Sosial Masyarakat

Selain aspek ekonomi, keberadaan KTH juga memberikan kontribusi yang besar terhadap penguatan modal sosial masyarakat. Modal sosial merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan masyarakat karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan, kerja sama, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama.

Melalui berbagai kegiatan kelompok, anggota KTH memiliki kesempatan untuk membangun hubungan sosial yang lebih erat. Pertemuan kelompok, kegiatan pelatihan,

serta pelaksanaan usaha bersama menciptakan ruang interaksi yang mendorong tumbuhnya rasa saling percaya dan solidaritas antaranggota.

Kegiatan yang dilakukan secara kolektif juga meningkatkan budaya gotong royong yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pedesaan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, gotong royong merupakan modal sosial yang penting karena mampu memperkuat kapasitas kelompok dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.

Keberadaan KTH juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa dan konservasi kawasan. Anggota kelompok menjadi lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam musyawarah, serta terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Penguatan modal sosial melalui KTH menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan program pemberdayaan. Kelompok yang memiliki tingkat kepercayaan dan kerja sama yang tinggi cenderung lebih mampu mengembangkan usaha bersama dan mempertahankan keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang.

Peran KTH dalam Mendukung Konservasi Kawasan Hutan

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi tidak hanya diukur dari peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, KTH memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kepentingan konservasi dan kebutuhan masyarakat.

Pendampingan yang dilakukan BBKSDA Riau tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup penyadartahuan mengenai fungsi kawasan konservasi dan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendampingan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai manfaat ekologis kawasan hutan serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila terjadi kerusakan hutan.

Peningkatan kesadaran tersebut mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap kawasan hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Masyarakat mulai memahami bahwa keberlanjutan sumber daya alam sangat berkaitan dengan keberlanjutan sumber penghidupan mereka sendiri.

Hasil penelitian Gunawan *et al.* (2022) menunjukkan bahwa perhutanan sosial memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan konservasi keanekaragaman hayati dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat

melalui KTH menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi dan fungsi ekologis kawasan hutan.

Analisis Peran KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat

Tabel berikut menunjukkan hasil analisis peran KTH berdasarkan empat aspek utama yang menjadi fokus penelitian.

Tabel 1. Analisis Peran Kelompok Tani Hutan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aspek	Bentuk Peran KTH	Dampak yang Dihasilkan
Kelembagaan	Pembentukan organisasi, administrasi kelompok, musyawarah anggota	Meningkatkan kapasitas organisasi dan partisipasi Masyarakat
Ekonomi	Pengembangan usaha produktif, bantuan ternak, pendampingan usaha	Menambah aset kelompok dan peluang peningkatan pendapatan
Sosial	Kerja sama kelompok, gotong royong, pertemuan rutin	Memperkuat modal sosial dan solidaritas masyarakat
Konservasi	Penyuluhan lingkungan, pendampingan konservasi Kawasan	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa KTH tidak hanya berfungsi sebagai kelompok ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat serta mendukung upaya konservasi kawasan hutan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui KTH menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan sekitar hutan.

Tabel 2. Analisis Peran Kelompok Tani Hutan dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Aspek	Bentuk Kegiatan KTH	Indikator Pemberdayaan	Dampak terhadap Masyarakat
Kelembagaan	Pembentukan struktur organisasi, penyusunan administrasi kelompok, penyelenggaraan rapat anggota, dan penyusunan program kerja	Meningkatnya kapasitas organisasi, keteraturan administrasi, dan kemampuan pengelolaan kelompok	Kelompok menjadi lebih mandiri, terorganisir, dan mampu mengakses program bantuan maupun kemitraan
Ekonomi	Pengembangan usaha produktif,	Bertambahnya aset produktif,	Meningkatkan sumber pendapatan

Aspek	Bentuk Kegiatan KTH	Indikator Pemberdayaan	Dampak terhadap Masyarakat
	bantuan ternak, pelatihan usaha, dan pengelolaan aset kelompok	keterampilan usaha, dan peluang ekonomi anggota	alternatif serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga
Sosial	Pertemuan rutin kelompok, gotong royong, musyawarah, dan kerja sama antaranggota	Meningkatnya partisipasi masyarakat, rasa memiliki kelompok, dan modal sosial	Terbentuknya solidaritas, kepercayaan, serta kerja sama dalam pembangunan Masyarakat
Konservasi	Penyuluhan lingkungan, sosialisasi fungsi kawasan konservasi, dan pendampingan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran lingkungan Masyarakat	Berkurangnya tekanan terhadap kawasan hutan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi
Peningkatan Kapasitas	Pelatihan, penyuluhan, pendampingan teknis, dan konsultasi usaha	Bertambahnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pengambilan Keputusan	Masyarakat lebih mampu mengelola usaha produktif dan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya hutan
Kemitraan dan Jejaring	Fasilitasi kerja sama dengan BBKSDA Riau, pemerintah desa, dan instansi terkait	Meningkatnya akses informasi, bantuan, dan dukungan program	Memperluas peluang pengembangan usaha dan keberlanjutan program pemberdayaan

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan laporan pendampingan KTH oleh BBKSDA Riau (2022–2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kecamatan Kampar Kiri Hulu memiliki peran yang signifikan dalam proses pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan KTH telah menjadi wadah pembelajaran, kerja sama, dan

pengorganisasian masyarakat yang mampu meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola kegiatan kelompok secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam aspek ekonomi, KTH berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif yang didukung oleh program pendampingan dan bantuan ekonomi dari BBKSDA Riau. Selain memberikan peluang peningkatan pendapatan dan aset produktif masyarakat, kegiatan kelompok juga memperkuat modal sosial melalui peningkatan kerja sama, gotong royong, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kelompok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KTH tidak hanya berfungsi sebagai organisasi ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Pada aspek lingkungan, KTH berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan, khususnya di wilayah penyangga Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendampingan, masyarakat didorong untuk mengembangkan usaha yang lebih ramah lingkungan serta berpartisipasi dalam upaya konservasi kawasan. Dengan demikian, KTH dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan perhutanan sosial yang mengintegrasikan aspek kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Saran

Keberlanjutan program pemberdayaan melalui KTH memerlukan dukungan pendampingan yang berkesinambungan dari pemerintah, BBKSDA Riau, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas kelompok dalam aspek manajemen usaha, pemasaran produk, dan pengembangan kemitraan agar manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat dapat meningkat secara optimal. Pengembangan usaha berbasis agroforestri dan hasil hutan bukan kayu juga perlu didorong sebagai alternatif usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung konservasi kawasan hutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel yang berjudul "*Peran Kelompok Tani Hutan dalam*

Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang telah memberikan berbagai informasi, data, serta dukungan terkait kegiatan pembentukan dan pendampingan Kelompok Tani Hutan di wilayah penyangga Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling yang menjadi dasar dalam penyusunan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas, dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan kajian mengenai pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Penulis juga mengapresiasi berbagai pihak, baik akademisi, penyuluh kehutanan, pengelola kawasan konservasi, maupun anggota Kelompok Tani Hutan yang telah memberikan masukan, pengalaman, serta informasi yang sangat bermanfaat dalam memperkaya pembahasan artikel ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan, dukungan, dan kontribusi yang diberikan sehingga artikel ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian sumber daya hutan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmoro, H., Sumardjo, Susanto, D., & Tjitropranoto, P. (2021). Peningkatan kualitas pemberdayaan kelompok tani hutan dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 18 (1), 15–25. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2021.18.1.15-25>
- Dewi, I. N. (2018). Kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan program perhutanan sosial. *Info Teknis EBONI*, 15(2), 65–77.
- Erbaugh, J. T., Pradhan, N., Adams, J., Oldekop, J. A., Agrawal, A., Brockington, D., Pritchard, R., & Chhatre, A. (2020). *Global forest restoration and the importance of community participation. Nature Ecology & Evolution*, 4(11), 1472–1476. <https://doi.org/10.1038/s41559-020-01265-7>
- Fardiansyah, D., Kusuma, A. B., & Pathiassana, M. T. (2022). Kajian penerapan model *agrosilvopastura* dalam peningkatan kesejahteraan dan pendapatan kelompok tani hutan Sorowua Desa Paradowane Kecamatan Parado. *Jurnal Tambora*, 6(2), 66–77.

- Fisher, M. R., Dhiaulhaq, A., & Sahide, M. A. K. (2019). *The politics, economies, and ecologies of Indonesia's third generation of social forestry*. *Forest and Society*, 3(1), 152–170. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>
- Gunawan, H., Yeny, I., Karlina, E., Suharti, S., Murniati, Subarudi, Mulyanto, B., Ekawati, S., Garsetiasih, R., Pratiwi, *et al.* (2022). *Integrating social forestry and biodiversity conservation in Indonesia*. *Forests*, 13(12), 2152. <https://doi.org/10.3390/f13122152>
- Herawati, T., Liswanti, N., Banjade, M. R., & Mwangi, E. (2017). Forest tenure reform implementation in Indonesia: From policy to practice. *Forest and Society*, 1*(2), 150–167.
- Maryudi, A., Nawir, A. A., Permadi, D. B., Purwanto, R. H., Pratiwi, S., Syofi'i, A., & Sumardanto, P. (2022). *Complex regulatory frameworks governing social forestry in Indonesia*. *Forest Policy and Economics*, 137, 102698. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102698>
- Mutaqin, D. J., Alviya, I., Lugina, M., & Indartik. (2019). Peran perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(2), 103–118.
- Nurrochmat, D. R., Hasan, M. F., Suharjito, D., Hadiano, A., Ekayani, M., Sudarmalik, Purwawangsa, H., Mustaghfirin, & Ryandi, E. D. (2017). Perubahan kebijakan perhutanan sosial dan implikasinya terhadap pengelolaan hutan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 23(3), 166–174.
- Octavia, D., Suharti, S., Murniati, Dharmawan, I. W. S., Nugroho, H. Y. S. H., Supriyanto, B., Rohadi, D., Njurumana, G. N., Yeny, I., Hani, A., *et al.* (2022). *Mainstreaming smart agroforestry for social forestry implementation to support sustainable development goals in Indonesia: A review*. *Sustainability*, 14(15), 9313. <https://doi.org/10.3390/su14159313>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Prabowo, D., Maryudi, A., Imron, M. A., & Senawi. (2021). *Forest farmer groups and community welfare improvement in social forestry programs*. *Forest and Society*, 5(1), 120–135.
- Rahayu, E. M., & Triwanto, J. (2021). Penyuluhan perhutanan sosial di kelompok tani hutan Kota Malang. *Jurnal Budimas*, 3(2), 545–549.

- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). *Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. Forest Policy and Economics, 111*, 102052. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- Suharjito, D. (2021). Perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 15(1), 1–14.
- Syahputra, O. H. (2021). Masa depan kedaulatan pangan: Dukungan agroforestri dalam produksi pangan melalui perhutanan sosial. Dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Samudra (hlm. 255–266).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Waskitho, N. T., & Syarifuddin, A. (2022). Pemberdayaan masyarakat sekitar KHDTK UMM dalam konservasi kawasan hutan melalui sistem agroforestri. *Jurnal Budimas*, 4(2), 1–9.
- Yeny, I., Suharti, S., Murniati, & Gunawan, H. (2022). *Community participation in social forestry development and biodiversity conservation in Indonesia. Forests, 13(12)*, 2152–2170.
- Zainuddin, M., & Rahman, A. (2020). Penguatan kelembagaan kelompok tani hutan dalam mendukung pembangunan masyarakat sekitar kawasan hutan. *Jurnal Penyuluhan*, 16(2), 145–158.